
amnesti internasional

Indonesia

Direktur-direktur Amnesti Internasional seluruh Asia Pacific mendesak partai-partai politik untuk menjadikan HAM sebagai prioritas

Maret 2004

AI Index: ASA 21/009/2004

Direktur-direktur dari 13 seksi Amnesti Internasional seluruh Asia Pasifik meminta para kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di pemilihan umum yang akan berlangsung pada 5 April 2004 untuk mempunyai komitmen bagi peningkatan situasi hak asasi manusia di Indonesia.

Amnesti International percaya bahwa pemilihan para anggota parlemen saat ini adalah suatu kesempatan yang penting untuk memperkuat usaha reformasi di Indonesia. Meskipun saat ini rakyat Indonesia menikmati kebebasan-kebebasan, tapi janji bagi suatu perubahan sesudah kejatuhan regim Orde Baru tahun 1998 belum terlaksana sepenuhnya. Rakyat biasa tetap terus menghadapi resiko pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus terjadi karena tidak adanya suatu proteksi hukum, lemahnya sistem pengadilan, miskinnya pelatihan dan lemahnya pengetahuan para polisi dan tentara, serta korupsi dan diskriminasi berbasis gender, etnik, dan agama.

Amnesti Internasional menyerukan 24 partai-partai yang ikut serta dalam pemilihan umum untuk secara terbuka menyatakan komitmen bagi membawa perubahan-perubahan pada hal-hal sebagai berikut:

❖ **Persamaan dalam hukum**

Setiap orang seharusnya sejajar di atas hukum dan perlindungan hukum harus dikembangkan menjadi milik setiap warga negara apapun etnik, agama dan jenis kelaminnya. Meskipun ada beberapa usaha dilakukan untuk suatu perubahan, sistem hukum di Indonesia tetap lemah dan rentan terhadap korupsi. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan hukum secara efektif dan konsisten memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya mereka yang secara social dan ekonomi terpinggirkan seperti misalnya masyarakat asli, kaum miskin kota, kelompok agama dan etnik minoritas. Di beberapa area diskriminasi hukum masih terjadi, seperti terhadap kaum etnik China Indonesia, yang bertentangan dengan kewajiban Indonesia dibawah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial.

- Komitmen untuk mempercepat proses reformasi hukum sehingga sistem hukum benar-benar mandiri dan bebas dari korupsi.
- Komitmen untuk mencegah pelaksanaan semua aturan-aturan hukum dan regulasi yang diskriminatif.

❖ **Kekerasan terhadap perempuan**

Perempuan di Indonesia terus mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia berkaitan statusnya sebagai perempuan. Angka kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan meningkat, tapi bagaimanapun belum ada suatu upaya mengatasinya dan sedikit sekali dukungan terhadap para korban. Pemerkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya oleh aparat keamanan dilaporkan terjadi di berbagai daerah konflik, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Tanpa pengecualian, hampir tidak ada investigasi terhadap hal tersebut dan para pelakunya tidak pernah disentuh hukum. Juga sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada, perlindungan terhadap para agen-agen pekerja yang tidak bertanggung jawab dan ribuan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang meninggalkan Indonesia setiap tahunnya untuk mencari pekerjaan di luar negeri. TWK di dalam Indonesia, banyak dari mereka masih anak-anak, juga mengalami berbagai tindak kekerasan. Para perempuan dan para gadis juga sering menjadi korban dari perdagangan untuk dijual ke industri sex komersial.

- Komitmen untuk mengubah aturan-aturan hukum dan penghapusan praktek-praktek yang mendiskriminasi kaum perempuan, termasuk diskriminasi terhadap hak-hak ekonomi dan status mereka didalam keluarga dan dalam perkawinan.
- Komitmen untuk mengadopsi dan pelaksanaan hukum dan aturan-aturan lainnya untuk melindungi perempuan dari kekerasan rumah tangga, perdagangan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

❖ **Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi**

Hak untuk kebebasan berekspresi telah diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimanapun, hak ini secara meningkat dilanggar terhadap para individu yang kritis pada kebijakan-kebijakan pemerintah baik ditingkat lokal maupun nasional. Tahun 2003 menjadi tahun paling tinggi angka para tahanan hati nurani yang di penjara sejak zaman Suharto. Dari 30 orang yang dihukum penjara sepanjang tahun ini termasuk para aktifis buruh, aktifis politis dan gerakan sipil pro-kemerdekaan di propinsi NAD dan Papua yang hanya mengekspresikan pendapatnya secara damai. Beberapa anggota media massa juga mengalami hal yang sama. Penegakkan terhadap kebebasan pers adalah salah satu perkembangan yang paling penting di Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir, tetapi ini sekarang menjadi terancam dengan meningkatnya jumlah aksi-aksi hukum terhadap para wartawan.

- Melakukan tuntutan bagi pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap para tahanan politik.
- Mempunyai komitmen bagi penghapusan aturan-aturan hukum yang mengekang kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam hukum-hukum internasional.

❖ **Perlindungan hak asasi manusia di daerah-daerah konflik**

Rakyat sipil adalah korban yang luas di daerah-daerah konflik di Indonesia, baik di konflik internal bersenjata seperti di NAD, operasi anti-gerilya di Papua, atau konflik-konflik berbasis agama dan etnik seperti halnya di Maluku atau di Sulawesi Tengah.

Pelanggaran HAM yang serius, oleh kedua pihak baik pasukan keamanan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dilaporkan terjadi di NAD sejak dimulainya status Darurat Militer bulan Mei tahun 2003. Hal ini mencakup pembunuhan diluar jalur hukum,

termasuk terhadap anak-anak, penghilangan paksa, penahanan dengan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk. Ratusan orang yang diduga sebagai pendukung GAM telah dihukum penjara, banyak diantaranya melalui suatu peradilan yang tidak adil. Di Papua, operasi-operasi dari polisi dan tentara terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah juga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM yang sangat serius.

- Secara resmi menyatakan ke publik bahwa partai politik anda menentang segala bentuk pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan tidak sah, penghilangan paksa dan penyiksaan.
- Komitmen untuk penyediaan pelatihan praktek-praktek HAM terhadap anggota pasukan keamanan, termasuk pelatihan tentang penggunaan upaya paksa dan tindakan dalam proses penangkapan dan penahanan. Aparat resmi yang terbukti memberikan perintah, membiarkan atau terlibat dalam pelanggaran HAM harus di mintakan pertanggungjawaban secara hukum terhadap aksi-aksi kejahatannya tersebut.
- Komitmen untuk mendukung setiap upaya bagi mencari solusi politik terhadap konflik-konflik yang berlangsung dengan menjadikan perlindungan dan penghormatan HAM sebagai pertimbangan utama.

❖ **Perlindungan terhadap para pelindung**

Aktifis HAM punya suatu legitimasi dan peran yang sangat berguna di setiap masyarakat. Melalui informasi yang tepat yang mereka berikan dari berbagai masalah yang terjadi, mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari cara yang ampuh bagi mengatasinya. Peran mereka dan hak dari setiap aktifis HAM untuk menjalankan tugasnya bebas dari ancaman intimidasi, perlakuan buruk, dipenjara atau berbagai bentuk pelanggaran lainnya merupakan hal yang sudah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bagaimanapun perlakuan buruk dan intimidasi terhadap aktifis HAM bukanlah yang tidak lazim di Indonesia. Dalam beberapa kasus mereka bahkan digugat sebagai menyebar luaskan berita bohong karena mempublikasi informasi berkaitan kondisi pelanggaran HAM. Di daerah-daerah konflik, ancaman terhadap mereka jauh lebih serius. Di NAD, 19 aktifis HAM telah terbunuh atau dihilangkan secara paksa sejak tahun 2000 dan paling kurang 19 orang telah ditahan secara sewenang-wenang sejak diberlakukannya status Darurat Militer.

- Menyatakan dukungan secara publik terhadap pekerjaan para pembela HAM dan berkomitmen untuk mendorong langkah-langkah pelaksanaan bagi melindungi para pembela HAM dalam melaksanakan tugasnya.
- Berkomitmen bagi menjamin investigasi akan dilakukan terhadap semua dugaan telah terjadinya pelanggaran terhadap pembela HAM.

❖ **Mengakhiri penyiksaan**

Dengan meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Meredahkan Martabat Manusia, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengakhiri praktek penyiksaan. Bagaimanapun penyiksaan terus terjadi baik di tahanan polisi maupun tentara. Amnesty Internasional menerima laporan yang rutin tentang penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan di NAD dan Papua. Dalam beberapa kasus telah berakibat pada kematian atau cacat seumur hidup. Diberbagai tempat lain, dilaporkan adanya kasus-kasus penyiksaan atau perlakuan buruk terhadap aktifis politik dan buruh, keluarga petani, anggota masyarakat adat, pihak-pihak lain yang terlibat

dalam berbagai protes, termasuk protes menentang kebijakan pemerintah, kebijakan pertambangan, pemotongan kayu, perkebunan dan bentuk-bentuk operasi komersial lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat lokal dan hak masyarakat adat.

- Secara publik mengutuk segala bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk, dan berkomitmen untuk secara tegas mencegah penyiksaan dan segala bentuk perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan meredahkan martabat manusia.
- Komitmen untuk penyediaan pelatihan untuk semua aparat penegak hukum, termasuk polisi, pejabat penjara dan tentara, tentang hak-hak para tahanan.

❖ **Mengatasi masalah impunitas**

Meskipun ada usaha-usaha belakangan ini dari pemerintah untuk membawa para pelaku pelanggaran HAM di beberapa kasus besar, impunitas (kebebasan dari hukum) tetap merupakan masalah besar. Impunitas masih menjadi hal yang masih belum bisa diatasi secara luas. Tidak adanya suatu mekanisme pertanggungjawaban yang efektif dan kuat, serta pengadilan yang independen membuat dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sangat jarang diinvestigasi dan para pelaku jarang dimintakan pertanggungjawaban terhadap aksi mereka.

Pembentukan pengadilan HAM untuk menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan dan pembunuhan massal (genoside) mencerminkan suatu langkah yang berarti bagi mengatasi masalah impunitas, tapi kesuksesannya sampai sekarang masih sangat terbatas. Sejauh ini hanya dua kasus utama yang dibawa ke pengadilan¹ dan beberapa lainnya telah diinvestigasi. Tapi lemahnya penuntutan, intimidasi terhadap para korban dan saksi dan kegagalan untuk memaksakan penghukuman telah mengancam upaya-upaya ini. Selain itu, ribuan dari orang-orang yang telah menderita pelanggaran HAM baru-baru ini dan dimasa lalu belum mendapatkan keadilan dan rehabilitasi.

- Mempunyai komitmen untuk melahirkan mekanisme yang bias menjamin semua dugaan pelanggaran HAM akan secara segera, secara independen dan secara sungguh diinvestigasi and, jika ada bukti yang cukup, para pelakunya dibawa ke pengadilan dengan cara konsisten dengan tetap menjaga hak-hak bagi pengadilan yang adil.

❖ **“Perang terhadap terror”**

Indonesia telah menjadi korban dari beberapa terror bom yang mengejutkan selama beberapa tahun belakangan ini, yang berakibat pada kematian tragis dari ratusan orang. Sebagai responnya pemerintah telah mengadopsi suatu aturan hukum baru tentang keamanan dan penangkapan dan penahanan para individu yang diduga terlibat dalam aksi terror. Amnesty Internasional mengakui bahwa setiap negara punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari tindak pidana semacam ini. Dan ketika hal itu terjadi, itu harus diinvestigasi dan pelakunya harus dibawa ke pengadilan dengan tetap menghormati hak untuk peradilan yang adil. Bagaimanapun, ada laporan-laporan yang menunjukkan mereka yang ditahan telah diperlakukan secara buruk dan aturan-aturan dasar untuk melindungi hak mereka, seperti memberi informasi terhadap anggota keluarganya tentang keberadaan mereka atau memberikan akses terhadap bantuan hukum tidak berlansung di semua kasus. Amnesty Internasional percaya mengekang HAM atas nama keamanan akan melahirkan kejurangan

¹ Dua kasus tersebut berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan serius lainnya yang dilakukan di Republik Demokrasi Timor-Leste (dulu dikenal sebagai Timor-timur) di tahun 1999 dan pembunuhan terhadap orang-orang Islam yang melakukan protes di Tanjung Priok, Jakarta Utara di tahun 1984.

dan ketidakpercayaan didalam negeri dan dengan negara-negara lainnya yang bisa menyebarkan benih-benih konflik.

- Menyatakan secara publik komitmen untuk menjamin bahwa hak-hak individu dari tersangka pelaku aksi terrorisme sepenuhnya dilindungi dan mereka akan menerima suatu pengadilan yang adil berdasarkan aturan-aturan internasional yang sudah diterima secara umum.

❖ **Penghapusan hukuman mati**

Catatan hukuman mati di Indonesia adalah salah satu yang paling progresif di Asia. Indonesia telah jarang sekali mengimplementasikan bentuk kekejaman dan tidak manusiawi dari hukuman mati ini - eksekusi terakhir terjadi di tahun 2001. Bagaimanapun, telah terjadinya suatu peningkatan terhadap jumlah orang yang divonis hukuman mati di beberapa tahun terakhir, misalnya terhadap pedagang narkoba dan juga pelaku yang terlibat dalam aksi-aksi pengeboman.

Meningkatnya tuntutan terhadap hukuman mati ini sangat bertentangan dengan banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya bahwa hukuman mati tidak akan mencegah orang dari melakukan aktifitas kejahatan dibandingkan dengan bentuk penghukuman lainnya. Pelaksanaan hukuman mati juga akan bertentangan dengan upaya-upaya internasional yang dilakukan bagi pembatasan penggunaan jenis hukuman ini untuk akhirnya harus benar-benar dihapuskan. Indonesia dapat menjadi contoh utama terhadap isu dasar HAM ini dengan menentang pelaksanaan hukuman mati.

- Komitmen untuk merevisi semua vonis mati yang telah dijatuhkan.
- Mempunyai komitmen untuk penghapusan hukuman mati sebagai sanksi hukum.

Akhirnya, para direktur dari seksi-seksi Amnesti Internasional se Asia Pasifik meminta semua partai-partai politik untuk menjamin para pengikutnya dan pasukan keamanan tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan menghormati hak-hak dari pendukung partai politik lainnya untuk secara bebas dan damai mengekspresikan dukungannya.

Ditanda tangani oleh para direktur dari:

Amnesty Internasional Australia
Amnesty Internasional India
Amnesty Internasional Hong Kong
Amnesty Internasional Jepang
Amnesty Internasional Korea
Amnesty Internasional Malaysia
Amnesty Internasional Mongolia
Amnesty Internasional Nepal
Amnesty Internasional Selandia Baru
Amnesty Internasional Pakistan
Amnesty Internasional Philipina
Amnesty Internasional Taiwan
Amnesty Internasional Thailand

<http://web.amnesty.org/ai.nsf/news>

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM
